



PERNYATAAN PERS

Hasil Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) Banda Aceh, 25 Februari 2006

Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) yang ke-30 diadakan pada hari ini, Sabtu 25 Februari 2006 dipimpin oleh Ketua AMM Pieter Feith. Delegasi Pemerintah Indonesia diwakili oleh Jendral Bambang Darmono dan delegasi GAM diwakili oleh Irwandi Yusuf. Gubernur Aceh Bapak Mustafa Abubakar juga menghadiri pertemuan ini.

Ketua AMM menginformasikan pihak-pihak mengenai pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Menteri Informasi dan Komunikasi Sofyan Djalil di Jakarta awal pekan lalu. Ketua AMM mengingatkan kepada pihak-pihak yang menghadiri COSA akan komitmen mereka untuk membangun kepercayaan dan keyakinan yang saling menguntungkan dan oleh karena itu menghimbau mereka untuk meningkatkan dialog langsung antara sesama pihak.

Pihak-pihak mendiskusikan beberapa insiden serius yang terjadi di Blangpidie dan Alue Leuhob (kabupaten Cot Girek) Lhokseumawe. Mengenai insiden di Blangpidie, AMM telah menyelidiki kasus yang merupakan insiden serius ini. AMM menyatakan kekhawatiran serius tentang setiap aktivitas kelompok illegal atau pihak-pihak yang mengarah pada pelanggaran pasal 4.9 dari Nota Kesepakatan. AMM meminta Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki dan melaporkan kembali kepada AMM selambatnya pada 9 Maret dan mendisiplinkan mereka yang terlibat. AMM akan mengajukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa SIRA secara penuh mematuhi Nota Kesepakatan. Lebih jauh lagi AMM menyatakan ketidakpuasannya terhadap provokasi yang mengarah pada kekerasan terhadap anggota AMM pada insiden yang terjadi Alue Leuhob, Lhokseumawe, dan meminta Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki identitas para pelaku.

Pemerintah Indonesia menjelaskan secara lengkap latar belakang program reintegrasi yang masih terus berlanjut. Pihak-pihak menyepakati perlunya sebuah struktur gabungan baru dan mekanisme koordinasi untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah dipresentasikan.

Mengenai kasus-kasus amnesti yang tertunda, AMM menyatakan bahwa ada beberapa kemajuan yang telah dibuat dalam mengklarifikasikan 20 kasus, dimana 13 kasus diantaranya akan dibebaskan. Kedua belah pihak berkomitmen untuk menjaga momentum dan secara langsung saling memberikan informasi dengan bertujuan memecahkan kasus-kasus yang masih ada sesegera mungkin. Meskipun kemajuan-kemajuan sejauh ini telah dibuat, ketua AMM akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggungjawabnya yang tertera dalam Nota Kesepakatan pasal 3.1.3

For further information, please contact:

Jüri Laas, AMM Press Officer/Spokesperson (International Media) +62 813 750 864 08

Faye Belnis, AMM Press Officer/Spokesperson (National Media) +62 816 187 91 67

Aceh Monitoring Mission: Jalan Tgk. Abdul Rauf No. 10

KPA Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, INDONESIA

Pihak-pihak mendiskusikan persiapan untuk pengeluaran kartu identitas sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pilkada seperti yang tercantum pada Nota Kesepakatan pasal 1.2.5

AMM menyatakan kepuasannya terhadap keinginan Pemerintah untuk membentuk sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia sebelum 15 Juni.

AMM mengkonfirmasi bahwa proses verifikasi pasukan organik TNI dan Polisi telah diselesaikan dan Pemerintah Indonesia mematuhi Nota Kesepakatan.

Pertemuan COSA berikutnya akan dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Maret 2006 pukul 13.00 WIB.

For further information, please contact:

Jüri Laas, AMM Press Officer/Spokesperson (International Media) +62 813 750 864 08

Faye Belnis, AMM Press Officer/Spokesperson (National Media) +62 816 187 91 67

Aceh Monitoring Mission: Jalan Tgk. Abdul Rauf No. 10

KPA Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, INDONESIA